

**PELAKSANAAN DISKRESI DALAM PENGGUNAAN SENJATA API PADA
PENANGKAPAN TERSANGKA TINDAK PIDANA OLEH ANGGOTA KEPOLISIAN
REPUBLIK INDONESIA
(STUDI DI KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA BARAT)**

Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



- 1. NELWITIS, S.H.,M.H.**
- 2. LUCKY RASPATI, S.H.,M.H**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG**

2018



| No. Alumni Universitas | Nola Susanti | No. Alumni Fakultas |
|---|--------------|---|
| a) Tempat/Tgl Lahir : Bayur, 01-01-1994 | | f) Tanggal Lulus : 17 Juli 2018 |
| b) Nama Orang Tua : Azwar (Alm) dan Yunita Elmi | | g) Predikat Lulus : Sangat Memuaskan |
| c) Fakultas : Hukum | | h) IPK : 3,29 |
| d) PK : Hukum Pidana | | i) Lama Studi : 3 Tahun 11 Bulan |
| e) BP : 1410112141 | | j) Alamat : Bandar Baru Jorong VI Parit Panjang Kec. Lubuk Basung Kab. Agam |

PELAKSANAAN DISKRESI DALAM PENGGUNAAN SENJATA API PADA PENANGKAPAN TERSANGKA TINDAK PIDANA OLEH ANGGOTA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA (STUDI DI KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA BARAT)

(Nola Susanti, 1410112141, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 78 Halaman)

ABSTRAK

Dalam Undang-undang No. 02 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Kepolisian menyebutkan "untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan wewenangnya dapat bertindak berdasarkan penilaian sendiri". Dengan demikian, kepada Kepolisian diberikan kewenangan mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab dalam situasi konkrit di lapangan berdasarkan penilaian sendiri dalam rangka penyelenggaraan fungsi Kepolisian. Dalam hal menjalankan diskresi kepolisian yang merupakan cakupan dari wewenang polisi itu sendiri harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prosedur tetap. Kepolisian dalam penggunaan senjata api pada penangkapan tersangka adalah tindakan paling terakhir yang dilakukan untuk melumpuhkan tersangka. Permasalahan yang diangkat dari penelitian ini adalah (1) untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan diskresi dalam penggunaan senjata api pada penangkapan tersangka tindak pidana oleh anggota Kepolisian Daerah Sumatera Barat, (2) bagaimana kendala dalam pelaksanaan diskresi dalam penggunaan senjata api pada penangkapan tersangka tindak pidana oleh anggota kepolisian Sumatera Barat. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode yuridis sosiologis yang didukung dengan data primer dan sekunder. Sumber data primer didapat melalui penelitian dengan informasi melalui wawancara dengan anggota kepolisian di Polda Sumbar, sedangkan sumber data sekunder didapat dari buku-buku dan laporan lainnya. Berdasarkan hasil penelitian Pelaksanaan Diskresi dalam penggunaan senjata api pada penangkapan tersangka tindak pidana di Kepolisian Daerah Sumatera Barat telah sesuai dengan Pasal 15 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian harus melakukan tindakan tembakan peringatan terlebih dahulu. Diharapkan kepada pemerintah dan internal polisi perlu adanya peningkatan kuantitas dan kualitas personil selain itu diharapkan kepada anggota kepolisian untuk bertindak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Standar Operasional Prosedur (SOP) dan etika profesi kepolisian demi terwujudnya tujuan kepolisian dengan semestinya.

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan lulus pada tanggal 17 Juli 2018. Abstrak telah disetujui oleh penguji.

Penguji,

| Tanda Tangan | Penguji I | Penguji II |
|--------------|----------------------------------|--------------------------|
| | | |
| Nama Terang | Dr. H. A. Irzal Rias, S.H., M.H. | Riki Afrizal, S.H., M.H. |

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Pidana : Dr. H. A. Irzal Rias, S.H., M.H.

Tanda Tangan

Alumnus telah mendaftar ke Fakultas/Universitas dan mendapat nomor alumnus:

| | | |
|------------------------|-------|---------------|
| No. Alumni Fakultas | Nama: | Tanda Tangan: |
| No. Alumni Universitas | Nama: | Tanda Tangan: |